

Implementasi Teknologi Enterprise Resource Planning (ERP) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Didik Kurniawan, Reni Utami Aringsih, Agus Wiyono

Jurusan S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa
Jl. Bhayangkara No.55, Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah
57154

Telepon +6281804450405

E-mail : kurniawandidik89@gmail.com

Abstrak

Implementasi Enterprise Resources Planning (ERP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari strategi penguatan beberapa proses bisnis dan pilihan yang cukup penting dalam konteks peningkatan kinerja sebuah instansi pemerintahan. Berbagai pengaruh lingkungan internal maupun eksternal telah menjadi dorongan tersendiri bagi perlunya ERP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Faktor eksternal dimaksud untuk mendorong peningkatan kualitas terhadap pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan kepada masyarakat. Sebagai sebuah sistem terintegrasi, ERP dalam konteks internal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja dari seluruh elemen penunjang seperti Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset – aset lain yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam tahap ini, implementasi ERP sangat diharapkan bisa memberikan banyak manfaat baik untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara khusus dan masyarakat luas secara umum dalam hal peningkatan layanan.

Kata Kunci : *Enterprise Resources Planning (ERP), Administrasi kependudukan, Pemerintahan*

Abstract

The implementation of Enterprise Resources Planning (ERP) at the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency is part of a strategy to strengthen several business processes and is an important choice in the context of improving the performance of a government agency. Various internal and external environmental influences have become the impetus for the need for ERP at the Population and Civil Registration Office of Sukoharjo Regency. The external factor is intended to encourage the improvement of the quality of the Population Administration Document service to the public. As an integrated system, ERP in an internal context is expected to improve the efficiency and performance of all supporting elements such as Human Resources, Finance and other assets owned by the Department of Population and Civil Registration. At this stage, ERP implementation is expected to provide many benefits both for the Department of Population and Civil Registration in particular and the wider community in terms of service improvement.

Keyword : *Enterprise Resource Planning (ERP), Civil Administration, Government*

1. PENDAHULUAN

Perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) adalah model sistem informasi yang memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis, dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada di dalam instansi dan tentunya peningkatan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan masyarakat dengan cara menembus berbagai hambatan fungsi tradisional dengan fasilitas data bersama di antara semua pengguna di instansi tersebut. Implementasinya berupa pengambilalihan besar-besaran hingga dapat berlangsung dalam beberapa tahun James A.Hall (2011:31).

Semua organisasi memiliki tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Bagi setiap organisasi agar tercapai visi misi organisasinya, harus dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Kemampuan mengintegrasikan unit-unit organisasi dan memecahkan konflik yang terjadi antar unit organisasi merupakan salah satu kunci sukses suatu organisasi. Teknologi informasi memiliki banyak andil dalam mengintegrasikan organisasi ini melalui penerapan *Enterprise resource planning*, Azhar Susanto, (2013:317)

Pentingnya pengendalian internal dalam *enterprise resource planning* tidak dapat dinyatakan secara berlebihan. Sifat terintegrasi sistem ERP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berarti bahwa kecuali setiap item data divalidasi dan dicek karena itu pengendalian entri data dan pengendalian akses menjadi hal yang penting. Pemisahan tugas memberikan pengendalian untuk memisahkan pertanggungjawaban penyimpanan aset, otorisasi aktivitas yang mempengaruhi aset serta mencatat informasi mengenai aktivitas organisasi, Romney (2015:63)

1.1 Enterprise Resource Planning (ERP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unit organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo berharap dapat mengimplementasikan ERP dengan baik harus memodifikasi proses bisnisnya agar sesuai dengan ERP, memodifikasi ERP agar sesuai dengan proses bisnisnya, atau biasanya memodifikasi keduanya (Hall, 2011:31)

Senada dengan hal di atas, Romney (2015:61) mengemukakan bahwa sistem ERP bersifat modular dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatiskan proses bisnis standar. Desain ini memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul yang diperlukan. Modul ERP yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo mencakup :

1. Keuangan berupa Perencanaan Anggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran serta laporan keuangan.

2. Sumber daya manusia meliputi pengukuran kinerja pegawai, pemberian hak pegawai berupa cuti dan gaji.
3. Pelayanan Masyarakat meliputi akses dokumen administrasi kependudukan secara menyeluruh dan maksimal
4. Data induk yang berisi data – data penting untuk pengukuran capaian kinerja.

Melihat kenyataan diatas, Penelitian ini mencoba untuk menemukan dan menggali informasi terkait dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong implementasi sistem terintegrasi ERP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana strategi implementasi ERP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo?

1.2 Tujuan Dan Manfaat

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong penerapan ERP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan juga mengidentifikasi strategi implementasi yang telah dilakukan, kaitannya pengelolaan sumber daya organisasi seperti SDM, Keuangan, aset organisasi dan juga kaitannya dengan usaha peningkatan pelayanan terhadap masyarakat utamanya dalam bidang Administrasi kependudukan .

2. METODOLOGI

Identifikasi masalah dilakukan melalui pengamatan dengan melihat data sekunder, seperti: literatur buku, regulasi dan kebijakan, laporan penelitian sebelumnya, data infrastruktur, dan lainnya. Setelah identifikasi masalah dilakukan, maka dilakukan identifikasi faktor-faktor melalui *tool of analysis* dalam analisis lingkungan internal dan eksternal. Identifikasi faktor ini didukung dengan landasan teori dan penelitian-penelitian ilmiah yang sudah ada

2.1 Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber Kepala Dinas&Bagian Perencanaan, keuangan dan juga dengan Manajemen Informasi Administrasi kependudukanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan data sekunder sebagai bahan/referensi tambahan atau studi literatur, seperti regulasi, kebijakan, laporan keuangan, penelitian sebelumnya, dokumentasi berupa laporan kegiatan dan lainnya.

2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, yang

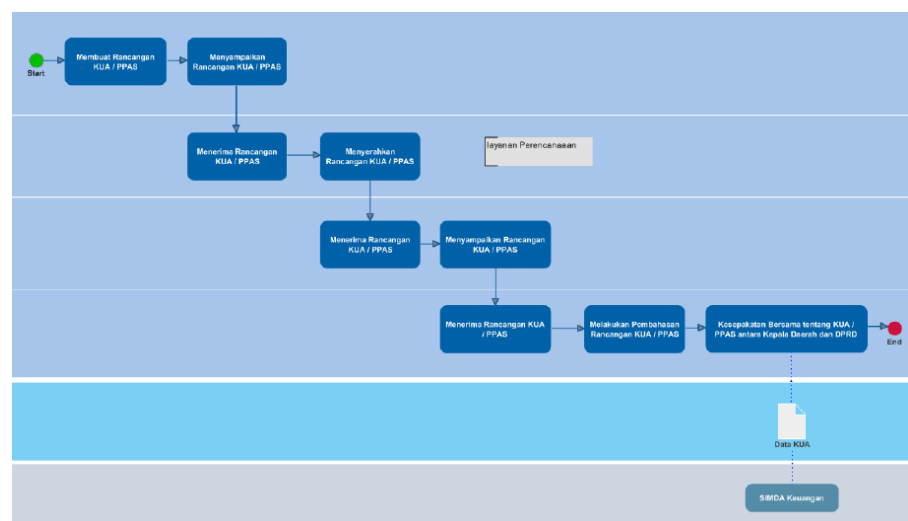
meliputi faktor eksternal dan juga internal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Unit analisis dalam penelitian ini adalah konteks organisasi pemerintahan daerah yang bergerak di bidang Administrasi kependudukan. Objek obeservasi adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

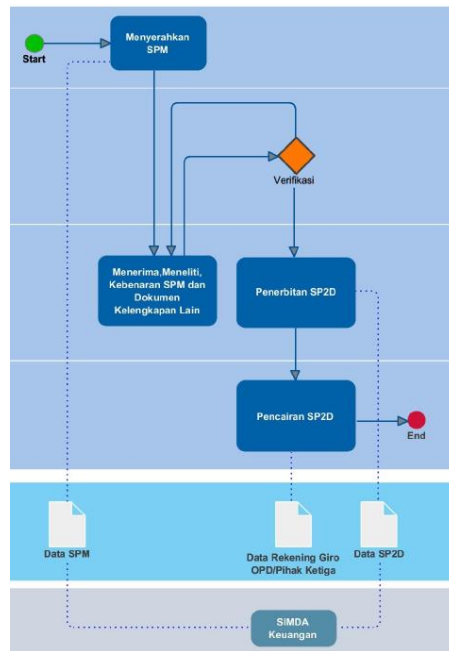
Penerapan ERP dalam meningkatkan kualitas SIM meliputi, integrasi, kemampuan pemantauan yang lebih besar, akses yang cepat, dan mengkonsolidasikan struktur akses data, (Pasko, 2002). Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi dalam penerapan ERP yang merupakan penerapan dari proses bisnis yang dimiliki

3.1 Gambaran Umum Proses Bisnis yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.1.1 Proses Bisnis di Bidang Keuangan



Gambar 1. Proses Bisnis Pengajuan KUA PPAS



Gambar 2. Proses Bisnis Pencairan Anggaran APBD

Dalam penerapan proses bisnis diatas, sangat dibutuhkan aplikasi yang bisa melakukan kontrol terhadap penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Dikarenakan dalam hal perencanaan maupun realisasi anggaran sangat dibutuhkan tools yang bisa membantu pengguna dalam melakukan pengecekan maupun perhitungan terhadap anggaran yang digunakan dan akan sangat merepotkan apabila dilakukan secara manual, dilihat dari besarnya anggaran dan banyaknya kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka dari itu ERP di lingkup Keuangan sangatlah dibutuhkan.

Beberapa Aplikasi yang telah digunakan dalam mendukung ERP di bidang perencanaan dan keuangan ini diantaranya :

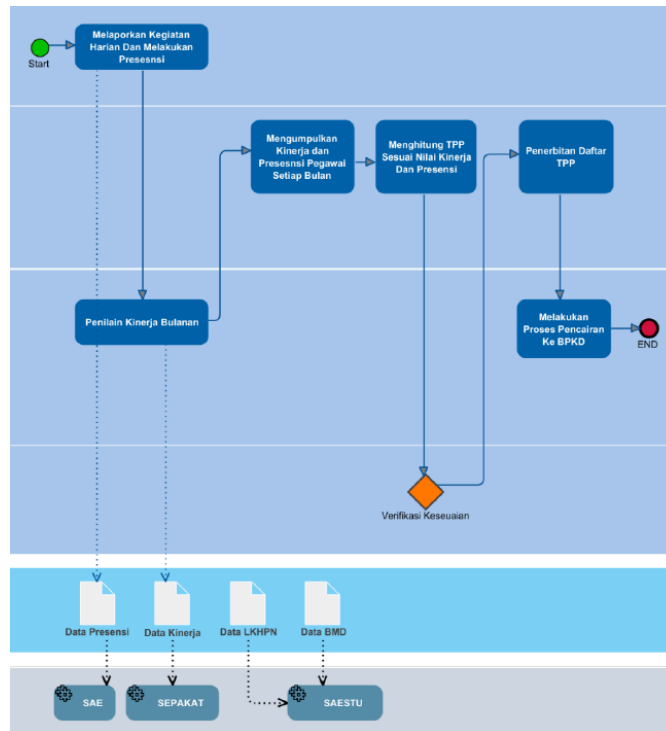
a. SIPD

Aplikasi SIPD adalah aplikasi yang dibuat oleh kemendagri yang digunakan di setiap kota kabupaten dalam hal perencanaan anggaran. Diharapkan dengan aplikasi ini, perencanaan anggaran bisa berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. SIMDA Keuangan

SIMDA keuangan adalah aplikasi dari Kemetrian Keuangan dalam hal ini BPKP, yang mana aplikasi ini digunakan untuk melakukan realisasi anggaran baik dari proses pertanggung jawaban sampai dengan proses pencairan dana.

3.1.2 Proses Bisnis di Kepegawaian



Gambar 3. Proses Bisnis di Kepegawaian

Seperti halnya proses bisnis di keuangan, di kepegawaian pun sangat diperlukan aplikasi untuk membantu bagian kepegawaian dalam hal pengukuran kinerja dan pengumpulan data kepegawaian. Hal ini didasarkan jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mulai dari Dinas sampai dengan UPT teknis yang jumlahnya bisa sampai ratusan. Tanpa bantuan aplikasi, sangat mustahil pekerjaan diatas dilakukan karena jumlah tenaga di bidang kepegawaian yang terbatas.

Beberapa Aplikasi yang telah digunakan dalam mendukung ERP di bidang kepegawaian ini diantaranya :

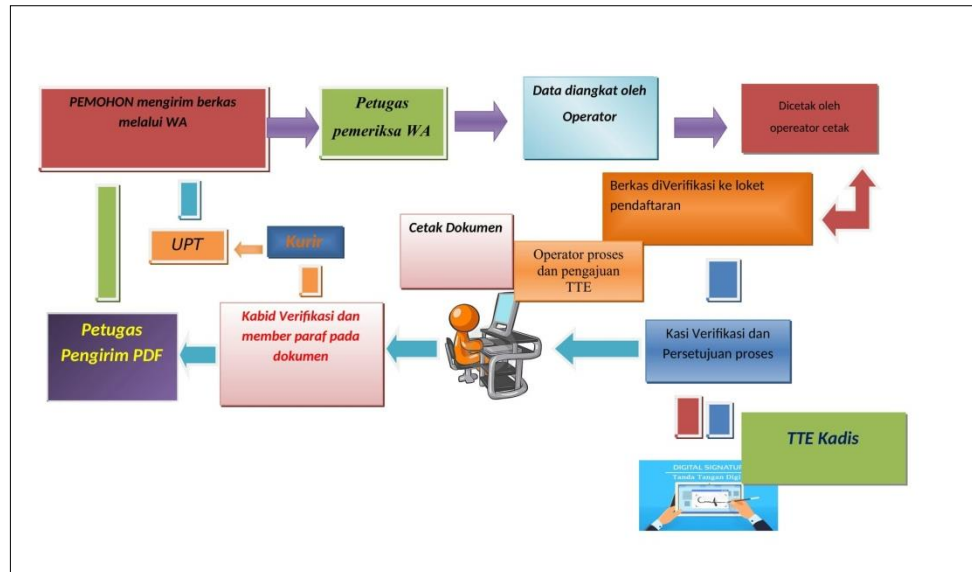
a. Sistem Presensi Elektronik

Aplikasi Sistem Presensi Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk menampung data presensi elektronik baik melalui alat finger print ataupun dengan aplikasi android. Dari hasil rekap di aplikasi ini, dapat dilihat tingkat kedisiplinan pegawai terutama dalam hal ketepatan waktu.

b. Simpeg

Simpeg adalah aplikasi yang digunakan untuk menampung data pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo

3.1.3 Proses Bisnis di Pelayanan Administrasi kependudukan Masyarakat



Gambar 3. Proses Bisnis Pelayanan Online Administrasi kependudukan Masyarakat

Pelayanan Administrasi kependudukan masyarakat merupakan salah tugas pokok dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dari itu penggunaan ERP di bidang pelayanan Administrasi kependudukan adalah suatu keharusan karena di era yang serba digital ini, pelayanan Administrasi kependudukan diharapkan bisa menjangkau ke semua lini masyarakat dan bisa digunakan dengan maksimal oleh semua lapisan masyarakat.

Aplikasi yang telah digunakan dalam mendukung ERP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

a. Website Layanan Online

SIMPUS adalah aplikasi yang dimiliki oleh puskesmas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan Administrasi kependudukan mulai dari perekaman data pasien, perekaman data rekam medik pasien, memberikan pelayanan untuk pasien BPJS, sampai dengan pemberian resep untuk pasien. Dengan aplikasi ini, admin pelayanan di puskesmas bisa mengolah data pelayanan pasien dengan lebih cepat sehingga pelayanan Administrasi kependudukan bisa lebih cepat dan maksimal.

b. Akone Mak'e

P-care adalah aplikasi bawaan dari BPJS Administrasi kependudukan yang mana bisa digunakan puskesmas untuk melakukan klaim untuk pelayanan pasien yang merupakan

anggota dari BPJS Administrasi kependudukan sehingga pelayanan untuk pasien BPJS bisa dilakukan dengan lebih baik .

c. SIAK (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Faktor yang dapat mendorong implementasi ERP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yaitu;
 - a. Tuntutan pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*)
 - b. Dorongan penerapan standar internasional dalam upaya IPO (*Initial Public Offering*).
 - c. Kebutuhan terhadap informasi yang bersifat *real time*.
 - d. Kebutuhan terhadap peningkatan efisiensi dan kinerja aset produk agar dapat lebih meningkatkan nilai tambah bagi organisasi.
2. Strategi implementasi ERP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo
 - a. Pengembangan perangkat lunak di mana produk dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap hingga produk selesai (*Incremental process*)
 - b. Penyiapan infrastruktur sumber daya perusahaan dan sumber daya manusia
 - c. Penyiapan tata kelola yang baik

4.2. Saran

Berikut saran terhadap penelitian-penelitian berikutnya:

1. Penelitian berikutnya dapat berfokus pada manajemen proyek dan tata kelola internal
2. *Incremental process* dengan memperhatikan *existing system*
3. Diperlukan juga sebuah studi kelayakan untuk melihat efek benefit dan resiko investasi ERP

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, James A. 2011. *Accounting Information Systems*. 7th Edition, Mason-USA: South-Western Cengage Learning.
- Susanto Azhar.2013. *Sistem Informasi Manajemen: Pendekatan Struktur Risiko Pengembangan*. Edisi Perdana: Lingga Jaya. Bandung.
- Romney B. Marshal, Steinbart. 2015. *Accounting Information Systems, Thirteenth Edition*. Pearson education limited. England.
- Mahfiza., 2020, Penerapan Teknologi Enterprise Resource Planning(ERP) Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Manajemen, *Journal Al-Buhuts*, Vol. 16 no 1 Juni 2020 pp. 157–167.